

DIMENSI SOSIO-POLITIK KONFLIK AMBON

Didit Rudiansyah

Universitas Islam Negeri (UIN)Sunan Kalijaga Yogyakarta

Alamat Email: Diditrudiansyah@gmail.com

Abstract

Conflict is a social aberration (chaos), a state where people are experiencing social disintegration. Conflicts usually occur in people who are going through a transition period. Levels of conflict becomes large if the transition process was also great in all areas (revolution), in contrast to small levels of conflict when the transition process was also small, covering only a few areas only. Driving dimensions can be varied conflicts, be it a political dimension, economic, control over resources, culture, ethnicity and religion. It needs a real resolution as preventive measures (prevention) or curative (repair) in tackling the outbreak of conflict in society.

Key Words: Conflict, social aberration, Heterogen, Ambon

Intisari

Konflik adalah penyimpangan sosial (chaos), sebuah negara di mana orang mengalami disintegrasi sosial. Konflik biasanya terjadi pada orang yang akan melalui masa transisi. Tingkat konflik menjadi besar jika proses transisi juga besar di semua bidang (revolusi), berbeda dengan tingkat kecil konflik ketika proses transisi juga kecil, hanya meliputi beberapa daerah saja. Mengemudi dimensi dapat konflik bervariasi, baik itu dimensi politik, ekonomi, kontrol atas sumber daya, budaya, etnis dan agama. Perlu resolusi nyata sebagai tindakan preventif (pencegahan) atau kuratif (perbaikan) dalam menanggulangi wabah konflik di masyarakat. Artikel ini membahas dimensi social-politik dalam wacana konflik ambon pada pasca rereformasi.

Kata Kunci: Konflik, Kekerasan, Keragaman, Ambon

Pengantar

Indonesia merupakan Negara yang meliputi wilayah Nusantara, tersebar dari Sabang sampai Merauke dengan begitu banyak suku bangsa, etnik, agama dan nilai-nilai local yang telah eksis sekian ratusan, bahkan jauh lebih lama lagi. Dengan kondisi sosio-kultur yang beragam, Indonesia menjadi Negara yang sangat menarik dan unik bila dibandingkan dengan Negara-negara lainnya, meskipun menyimpang potensi kekayaan yang luarbiasa, tetap saja Indonesia yang multi-etnik, budaya, bahasa dan agama menjadi rentang dengan kemungkinan terjadi konflik dan kekerasan yang keragaman itu menjadi alat yang memicu konflik.

Indonesia selain Negara yang multi etnik dan suku bangsa, juga Indonesia merupakan Negara yang terdiri dari beribu pulau, setidaknya terdapat lebih dari tujuh belas ribu pulau, terdapat berbagai macam suku bangsa, etnik, ras dan agama dengan keragaman budaya, telah membentuk Indonesia yang indah dan menarik, tetapi sekaligus juga potensial memicu berkembangnya berbagai konflik sosial, baik karena motif sosial, ekonomi, dan politik.

Di indonesia sendiri sampai sekarang agama-agama yg berkembang yaitu terdiri dari Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu. Masing-masing agama mempunyai karakteristik dan ciri khasnya tersendiri. Terutama dalam sistem sosial masyarakat, dimana pada dasarnya adat istiadat serta norma-norma dalam masyarakat merupakan produk dari agama. Berdasarkan hal tersebut, maka tidak jarang kalau akhirnya timbul konflik dalam masyarakat yang dibungkus dengan alasan diferensiasi agama. Konflik ini timbul karena perbedaan ajaran dan nilai dari masing-masing agama.

Tulisan ini akan menjawab atau mendiskusikan beberapa pertanyaan berikut ini; 1). Apakah konflik yang terjadi dalam masyarakat karena faktor agama? Atau adakah faktor lain yang menjadi pemicu konflik? Jangan-jangan agama hanya dijadikan sebagai alat bagi pihak-pihak yang berkonflik? Kalau ditambah lagi akan ada sejumlah pertanyaan lain lagi, namun tulisan ini berusaha menjelaskan dan menganalisis seputar persoalan diatas, tulisan ini pun tidak bermaksud menjawab secara tuntas persoalan-persoalan tersebut.

Tulisan ini akan menggunakan metode deskripsi analitis, metode ini diharapkan dapat memberikan deskripsi atau gambaran umum mengenai konflik yang terjadi di Ambon (Maluku).

Konflik dan Kekerasan: Kerangka Konsep

Konflik berasal dari kata kerja latin *configere* yang berarti saling memukul. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih (bisa juga kelompok) dimana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya.

Dalam kehidupan umat manusia, konflik telah menjadi sesuatu yang selalu ada, baik itu konflik yang bersifat *laten* maupun *manifes*. Konflik laten seringkali muncul dalam kondisi masyarakat yang bersifat tertutup, sementara konflik yang termanifestasikan secara real, dipicu oleh berbagai sebab dan lingkungan sosial yang bersifat "transisi", tapi juga konflik jenis ini sering pula dipicu oleh keinginan suatu kelompok, negara atau etnis untuk menguasai negara, kelompok, atau etnis lain.¹

Konflik sendiri terdiri dari bermacam-macam jenis. Menurut Dhrendoorf konflik dibedakan menjadi 4 macam, yaitu; 1). Konflik antara atau dalam peran sosial (antarpribadi), misalnya antara peranan-peranan dalam keluarga atau profesi (konflik peran/role); 2). Konflik antara kelompok - kelompok sosial (antar keluarga, antar gank); 3). Konflik kelompok terorganisir dengan kelompok tidak terorganisir (polisi melawan massa) dan 4). Konflik antar satuan nasional (kampanye, perang saudara).

Sebagai gejala sosial, konflik akan selalu ada pada setiap masyarakat, karena antagonisme atau perbedaan menjadi ciri dan penunjang terbentuknya masyarakat. Para sosiolog menyebutkan bahwa perbedaan-perbedaan sosial tidak mungkin bisa dihindari, tidak mungkin ada kelompok lapisan atas jika tidak ada lapisan bawah dan menengah.²

Masyarakat di dalam pandangan Karl Marx terdiri dari dua kelas yang saling berbenturan, yaitu masyarakat lapisan atas atau majikan (pemilik modal) dan masyarakat lapisan bawah atau kaum buruh (proletariat). Meski kemudian ada kelas menengah yang secara langsung mempunyai afiliasi kepentingan dengan kedua kelompok diatas. Posisi kelas menengah ini tidak begitu jelas bahkan dalam bagian tertentu menjadi agen bagi para pemilik modal, tetapi juga sekaligus sebagai mediator dan pembela kepentingan rakyat. Kelas borjuasi dan proletariat tidaklah menjadi sumber tunggal teradinya konflik, sebab

1 Syarifuddin Jurdi, Konflik dan Kekerasan dalam Politik Nasional, dalam Jurnal Sosiologi Reflektif, Volume 2, Nomor 1, Oktober 2007.

2 *Ibid.*, hlm.,145

terdapat berbagai faktor lain yang memicu meluasnya konflik dalam suatu komunitas masyarakat, karena bagaimanapun juga konflik selalu terkait dengan instrumen lain yang ikut menggerakannya. Konflik yang terjadi di Ambon merupakan konflik antar kelompok-kelompok sosial.

Konflik atau *chaos* merupakan suatu proses sosial yang berlangsung dengan melibatkan orang-orang atau kelompok-kelompok yang saling menantang dengan ancaman kekerasan. Dalam bentuknya yang ekstrem, konflik itu dilangsungkan tidak hanya sekedar untuk mempertahankan hidup atau eksistensi (jadi bersifat defensif), akan tetapi bertujuan sampai ke taraf pembinasaan eksistensi orang atau kelompok lain yang dipandang sebagai lawan atau saingannya.³

Implikasi Sosio-Politik Konflik

Secara ekstrem konflik memang bertujuan untuk mempertahankan eksistensi dan bahkan pembinasaan eksistensi kelompok lain yang menjadi saingannya. Meskipun demikian konflik juga berdampak positif bagi masyarakat, meskipun konflik itu sendiri adalah suatu proses yang bersifat disasosiatif. Salah satu dampak positif dari suatu konflik adalah bertambahnya solidaritas *intern* dan rasa *in-group* suatu kelompok. Apabila terjadi pertentangan antar kelompok-kelompok, solidaritas antar anggota di dalam masing-masing kelompok itu akan meningkat sendiri. Solidaritas di dalam suatu kelompok, yang pada situasi normal sulit dikembangkan, akan langsung meningkat pesat saat terjadinya konflik dengan pihak luar.

Sejalan dengan peristiwa diatas, konflik-konflik antar suatu kelompok pun memudahkan perubahan-perubahan dalam masyarakat. Diantaranya perubahan sistem sosial, norma, kebudayaan, bahkan reformasi dan revolusi. Banyak reformasi dan revolusi terjadi karena didahului adanya konflik dalam masyarakat, contoh revolusi perancis, reformasi indonesia pada tahun 1998. Jadi, tidak semuanya konflik selalu berdampak negatif bagi masyarakat.

Konflik sendiri akan berakhir dalam berbagai kemungkinan. Apabila kekuatan masing-masing pihak yang bertentangan ternyata berimbang, maka kemungkinan besar akan terjadi suatu usaha akomodasi oleh kedua belah pihak yang bertikai. Sebaliknya, apabila kekuatan kedua belah pihak yang tengah bentrok itu tidak berimbang, maka akan terjadi penguasaan (dominasi) oleh salah satu pihak yang kuat terhadap lawannya.

3 J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto (ed), *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2007).

Pertentangan (conflict) masyarakat, mungkin pula menjadi sebab terjadinya perubahan sosial dan kebudayaan.⁴ Konflik antar umat beragama yang terjadi di Ambon secara tidak langsung bisa mengubah sistem sosial dan nilai atau norma di daerah tersebut. Dalam hal ini bisa berdampak pada berubahnya kebudayaan.

Selanjutnya Soerjono Soekanto kembali menjelaskan bahwa umumnya masyarakat tradisional di Indonesia bersifat kolektif. Segala kegiatan didasarkan pada kepentingan masyarakat. Kepentingan individu walaupun diakui, tetapi mempunyai fungsi sosial. Tidak jarang timbul pertentangan antara kepentingan individu dengan kepentingan kelompok, yang dalam hal-hal tertentu dapat menimbulkan perubahan-perubahan.⁵ Jadi, bisa disimpulkan bahwa sangat rentan sekali muncul konflik dalam masyarakat Indonesia, terutama masyarakat yang masih tradisional. Baik itu konflik antar individu, individu dengan kelompok, dan antara kelompok dengan kelompok

Dampak negatif yang lain dari konflik sendiri diantaranya yaitu munculnya keretakan hubungan antar kelompok yang bertikai, perubahan kepribadian antar individu, misalnya timbul rasa dendam, benci, saling curiga, kemudian kerusakan harta benda dan hilangnya jiwa manusia, dan yang terakhir adalah dominasi bahkan penaklukan salah satu pihak yang terlibat dalam konflik.

Eskalasi Konflik Ambon

Terdapat banyak sekali faktor-faktor penyebab konflik, kesemuanya itu tergantung dari motif, tujuan, dan kepentingan yang beragam. Kita tidak bisa begitu saja menjustifikasi bahwa konflik yang terjadi di Ambon, hanyalah karena faktor diferensiasi agama. Masih banyak faktor lain sebagai pemicu konflik. Untuk mempertegas proses teradinya eskalasi konflik di Ambon, terdapat beberapa faktor pemicu terjadinya eskalasi konflik.

Pertama, dimensi ekonomi (stratifikasi sosial). Ekonomi sangat berperan besar sebagai faktor pemicu konflik. Hal ini wajar karena ekonomi merupakan elemen utama (dasar) dalam kehidupan manusia. Sejarah mencatat, banyak konflik-konflik didunia ini terjadi karena faktor ekonomi. Sebut saja ketika bangsa asing menjajah negara kita, semua itu karena alasan ekonomi. Indonesia yang kala itu kaya akan sumber daya alam terutama rempah-rempah, menjadi sasaran empuk bangsa-

⁴ Soerjono Soekanto, 2007, *Sosiologi, Suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja grafindo persada).

⁵ *Ibid.*, hlm.180-181.

bangsa lain untuk menjajah. Kemudian konflik yang terjadi di Sambas, Kalimantan Barat. Penelitian membuktikan bahwa faktor pemicunya bukan karena perbedaan suku, dalam hal ini etnis Dayak dan Madura, tetapi pemicunya adalah karena faktor ekonomi. Orang madura yang merupakan suku pendatang, terlalu banyak mengasai sektor-sektor penting, terutama sektor ekonomi di Sambas. Hingga akhirnya timbulah konflik yang dibungkus dengan tema konflik antar-suku.

Sebelum kita membahas penyebab konflik yang terjadi di Ambon dari kacamata ekonomi, kita akan membahas terlebih dahulu apa itu ekonomi dan dampaknya terhadap konflik.

Ekonomi berbicara tentang bagaimana masyarakat memanfaatkan sumber daya alam yang terbatas (langka), untuk menghasilkan sesuatu yang bernilai dan dapat didistribusikan kepada pihak lain. Situasi ekonomi (*economic situation*) adalah keadaan dimana sumber daya yang tersedia (*resources*), yang terdiri dari sumber daya alam (*natural resources*), sumber daya manusia (*human resources*), dan tanah (*land*) yang kondisinya terbatas, mampu mengcover atau memenuhi kebutuhan atau keinginan manusia yang tak terbatas.

Secara ekonomi, kehidupan di dalam masyarakat akan membentuk sistem kelas sosial atau stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial inilah yang sangat dominan sebagai pemicu konflik. Stratifikasi sosial adalah sistem pelapisan-pelapisan sosial di dalam masyarakat. Inti dari stratifikasi sosial adalah perbedaan akses golongan satu dengan golongan masyarakat lain dalam memanfaatkan sumber daya. Jadi, dalam stratifikasi sosial, tingkat kekuasaan, hak istimewa dan *prestise* individu tergantung pada keanggotaannya dalam kelompok sosial, bukan pada karakteristik personalnya.⁶

Data dari badan pusat statistik (BPS) menyatakan bahwa di daerah Ambon, jumlah orang Kristen dan Muslim hampir berimbang, bahkan hingga sekarang warga Kristen jauh lebih banyak dari pada warga Muslim. Kalau kita melihat melalui kacamata sejarah, bahwa daerah Ambon merupakan basis bagi penyebaran agama Kristen. Jadi, secara kultural maupun struktural, masyarakat Kristen sudah mapan dan eksis di Ambon. Kemudian kalau kita mengkaji dari sisi masyarakat Muslim, secara kultural dan struktural juga sudah mapan dan eksis di Ambon.

Data BPS 1990 tentang produksi dan luas areal tanaman pangan tidak menyebut angka berarti untuk Pulau Ambon. Komoditi pangan terpenting yang dikonsumsi oleh penduduk Pulau Ambon, yakni beras, tidak dibudidayakan di pulau ini. Pasokan beras di Ambon

6 J. Dwi Narwoko dan Bagong suyanto (ed)., hlm 152-154.

sebelum konflik terutama datang dari Namlea di Pulau Buru dan Seram yang sebagian besar dihasilkan oleh transmigran, terutama dari Jawa. Sesungguhnya, makanan asli penduduk Pulau Ambon semula adalah sagu. Tetapi sekarang banyak dari mereka telah bergeser ke makanan pokok beras. Pergeseran ini membuat penduduk Pulau Ambon menjadi bergantung dari dunia luar. Karena itu, masyarakat Ambon dari segi sumber daya ini sebenarnya sangat rentan, sehingga jika terjadi kelangkaan beras atau bahan pangan lain, hal itu bisa memicu keresahan sosial.⁷

Kedua, faktor/dimensi kebudayaan Di depan sudah disinggung bahwa nilai-nilai dan norma yang ada di dalam agama sudah dikonversikan dalam bentuk adat istiadat dan kebudayaan. Contoh saja masyarakat Aceh, dimana nilai dan norma di dalam ajaran agama Islam sudah membentuk adat istiadat dan kebudayaan disana. Agama memang sebagai elemen yang mempunyai peran penting dalam pembentukan kebudayaan.

Kebudayaan menurut James P. Spradley, adalah pengetahuan yang diperoleh dan digunakan orang untuk menginterpretasikan pengalaman, dan melahirkan tingkah laku sosial. Sedangkan sifat kebudayaan itu relatif (berbeda) menurut daerah masing-masing.

Sedangkan menurut Koentjaraningrat, unsur-unsur sebagai pembentuk kebudayaan yaitu :teknologi, mata pencaharian, sistem kemasyarakatan, bahasa, sistem pengetahuan, religi(agama).

Terdapat perbedaan nilai, norma, adat istiadat dan kebudayaan antara masyarakat Muslim dengan masyarakat Kristen. Diferensiasi tersebut terdapat pada perbedaan sistem sosial, norma, dan nilai-nilai dalam masyarakat. Diferensiasi tersebut apabila terdapat sedikit saja gesekan maka dapat memicu konflik. Bentuk konfliknya pun beragam, bisa juga kecil yang terjadi antara kelompok-kelompok masyarakat yang kecil, dan bisa juga besar yang melibatkan antara suku atau antar etnis seperti yang kita lihat di Ambon.

Menurut Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) tahun 1995, Pulau Ambon dihuni oleh sekitar 311.974 jiwa penduduk. Dari jumlah ini sekitar 248.312 jiwa tinggal di perkotaan dan sisanya sekitar 62.662 jiwa berdiam di daerah pedesaan. Dengan kata lain, penduduk Pulau Ambon lebih bersifat 'mengkota', dimana sebagian penduduknya terkonsentrasi di kota sehingga kota Ambon termasuk kota yang padat penduduk. Atau dapat dikatakan, bahwa Kota Ambon merupakan kota

⁷ Dandung Budi Yuwono, *Gerakan Multicultural di Tengah Konflik Ambon*, dalam Harmoni, Jurnal Multikultural dan Multireligius, Vol.VII, No.27, Juli-September 2008.

populatin boom di Indonesia Timur dengan perkembangan penduduk yang meningkat pesat dari 79.636 jiwa pada tahun 1971 (sensus 1971) menjadi 311.974 jiwa pada tahun 1995 (sensus 1995).⁸

Ketiga, faktor/dimensi politik(politik etnik). Hubungan antara kelompok yang berbeda yang semula rukun suatu saat bisa berubah menjadi penuh konflik ketika di dalamnya diberi muatan politik atau dimanipulasi untuk kepentingan elite-elite politik. Perebutan wilayah dan karena adanya beberapa elite politik tertentu yang ingin meraih kepentingannya masing-masing telah menyebabkan dua kelas etnis yang semula hidup berdampingan itu menjadi saling selisih paham. Mereka tak cuma saling mempertahankan perbedaan ideologi dan agama, tetapi bahkan mereka tak segan untuk saling membunuh.⁹

Politik etnik banyak diabaikan orang. Tetapi sesungguhnya politik etnik sangat berperan penting sebagai elemen pemicu konflik. Pengertian politik etnik sendiri adalah tindakan politik yang menggunakan basis politik untuk mobilisasi sosial. Indikator dari politik etnik sendiri yaitu; *pertama*, Mengarahkan orang secara kondusif untuk tanggap terhadap relevansi politik untuk kepentingan nilai kultural etnis masyarakat. *Kedua*, Merangsang kepedulian orang-orang terhadap nilai-nilai kultural etnis. *Ketiga*, Memobilisasi kelompok etnik kedalam kesadaran kelompoknya, dan *keempat*, Mengarahkan perilaku etnik menuju tindakan politik.

Etnopolitic conflict yang melahirkan gerakan sparatisme di daerah manapun selalu berpangkal kepada persoalan ketidakadilan, kesenjangan, dan perbedaan ideologi. Salah satu penyebabnya adalah adanya mekanisme dampak saring (*filtering effect*), yaitu suatu dampak yang disebabkan oleh program pembangunan yang hanya bisa dinikmati oleh mereka yang sesuai dengan program pembangunan, sementara mereka yang tidak masuk dalam standar tidak memperolehnya.¹⁰

Di dalam politik etnik, konflik yang terjadi adalah dalam tingkatan politis, pada konflik ini terjadi bentuk pertentangan di dalam pembagian status kekuasaan, dan sumber ekonomi yang terbatas dalam masyarakat. Dalam kondisi konflik, maka sadar ataupun tidak sadar setiap yang berselisih akan berusaha untuk meningkatkan dan mengabdikan diri dengan cara memperkokoh solidaritas kedalam diantara sesama anggotanya, membentuk organisasi-organisasi kemasyarakatan untuk keperluan kesejahteraan dan pertahanan bersama. Mendirikan sekolah untuk memperkuat identitas cultural,

8 Dandung Budi Yuwono, *Op. Cit.*, hlm 41

9 Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto (ed), *Op. Cit.*, hlm 199.

10 *Ibid.*, hlm 3.

meningkatkan sentimenitas etnosentrisme, stereotipisme, keagamaan, dan usaha-usaha lain yang meningkatkan primordialisme.

Dominasi etnik dan kebudayaan, dimanapun dan kapanpun jika dimanfaatkan secara politik untuk kepentingan golongan, bukan untuk bangsa dan negara, maka akan selalu melahirkan konflik yang bersifat horizontal dan vertikal. Kembali ke pembahasan awal mengenai konflik yang terjadi di Ambon, bisa saja salah satu faktor pemicunya adalah politik etnik. Mengingat di Ambon masyarakatnya terdiri dari beragam etnik, di Ambon sendiri terdapat 4 etnik besar, yaitu Buton, Bugis, Makassar, dan Ambon. Konflik tersebut timbul karena adanya dominasi dari salah satu kelompok etnik, dan kelompok etnik yang lain merasa dirugikan dan ingin memberontak. Dalam hubungannya pun antara etnik BBM (Buton, Bugis dan Makassar) dengan etnik Ambon sangat sulit sekali untuk bisa hidup berdampingan dan menjalin hubungan baik.

Keempat, dimensi diferensiasi ras dan etnis. Indonesia merupakan negara yang multikultur. Terdiri dari banyak suku bangsa atau etnis. Masing-masing suku atau etnik mempunyai daerahnya masing-masing. Suku yang dominan di Pulau Jawa tentunya adalah suku Jawa, di Pulau Sumatra adalah suku Batak, Minangkabau, dan Aceh, di Pulau Kalimantan yang dominan adalah suku Dayak, di Pulau Madura adalah suku Madura, dll. Dan masih banyak lagi suku atau etnik lain yang terdapat di Indonesia.

Sikap etnosentrisme yang berlebihan tentunya bisa menimbulkan konflik apabila terjadi gesekan-gesekan antar etnis. Konflik antar etnik yang terjadi bisa juga merupakan warisan konflik dari nenek moyang. Contohnya adalah konflik yang terjadi antara etnik Dayak dengan Madura yang sudah lama terjadi.

Menurut Horton dan Hunt (1987:60), ras adalah suatu kelompok manusia yang agak berbeda dengan kelompok-kelompok lainnya selain dalam segi ciri-ciri fisik bawaan, dalam banyak hal juga ditentukan oleh pengertian yang digunakan oleh masyarakat. Dengan demikian, perbedaan masyarakat atas dasar ras bisa didasarkan atas perbedaan ciri fisik maupun sosial (Banton,1967). Ras dalam definisi berdasarkan geografis adalah kumpulan individu atau kelompok yang serupa dalam sejumlah ciri dan yang menghuni suatu teritori serta acapkali berasal mula sama.¹¹ Seiring dengan perubahan sosial yang terjadi, perbedaan masyarakat ras akhirnya makin lama makin kompleks karena masyarakat manusia semakin terbuka, baik secara budaya, sosial, maupun secara geografis.

¹¹ Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, *Op. Cit.*, hlm 195-196.

Kalau konsep kelompok ras didasarkan pada persamaan ciri fisik, maka konsep golongan etnik atau suku bangsa didasarkan pada persamaan kebudayaan. Menurut koentjaraningrat (1983), konsep yang tercakup dalam istilah suku bangsa adalah suatu golongan manusia yang terikat oleh kesadaran dan identitas akan kesatuan kebudayaan, dan kesadaran dan identitas tadi sering kali juga dikuatkan oleh kesatuan atau persamaan bahasa.¹² Di Indonesia misalnya, kita mengenal adat etnik Jawa, Ambon, Madura, Cina, Minangkabau, Batak, dan sebagainya.

Di Ambon terdapat sub suku kecil-kecil atau fam-fam (marga). Marga-marga tersebut menurut Effendi mencakup banyak komunitas seperti fam Wattimena, Lakollo, Kaisina, Korputy, Kakerissa, Riupassa, Anakotta, Payapo, Pasireron, Manuputty, Pasal, Pasanena, Kiry, Killian, Tamaela, Simatauw, Sitania, Mahusa, Halatu, Tauran, Wattimuri, Lasamahu, Soutssa, Lessy, dan lain - lain. Jika dikelompokan menurut tempat asal dan urutan kedatangan mereka, masyarakat Ambon Lease menurut Effendi dapat dikelompokan menjadi empat kelompok besar, yaitu; 1) kelompok 'wakan' yang berasal dari kepulauan Banda dan Kei, daerah bagian Selatan dan Tenggara; 2) kelompok 'Tuni' datang dari pulau Seram dan sekitarnya; 3) kelompok 'Moni' yang datang dari daerah bagian Utara, yaitu Halmahera, Ternate, Tidore. Ada juga diantara mereka yang datang dari Barat Laut, seperti kepulauan Sula, dan ada pula yang datang dari daerah Timur bagian Papua; 4) kelompok 'Mahu' yang datang dari daerah bagian Barat, terutama dari Pulau Jawa diantaranya Tuban yang pada waktu itu merupakan pusat dari perdagangan dan pengembangan agama Islam di bagian Timur Pulau.¹³

Diperkirakan, berdasar analisis data Sensus 1971 dan Survei Penduduk Antar Sensus (Supas) 1995, kelahiran bukan asli Maluku meningkat dari 5,2 % tahun 1971 menjadi 14,1 % pada tahun 1995. Dari perkembangan ini, migran dari Sulawesi Selatan, sebagian besar etnis Buton, Bugis, Makassar, sangat penting untuk dicatat. Pada tahun 1971 jumlah mereka sekitar 17.710 atau 1,6 % dari penduduk seluruh Propinsi Maluku. Pada tahun 1995, jumlah mereka telah meningkat menjadi 77.090 atau mencapai 3,7 %. Peningkatan kaum migran juga datang dari Jawa. Pada tahun 1971 jumlah mereka sekitar 12.904 atau 1,2 % terutama berasal dari Jawa Timur dan Jawa Tengah. Pada tahun 1995, jumlah penduduk mereka meningkat menjadi 54.405 orang atau mencapai 2,2 % dari seluruh penduduk Maluku.¹⁴

¹² *Ibid.*, hlm 197.

¹³ Dandung Budi Yuwono, *Op. Cit.*, hlm 41.

¹⁴ *Ibid.*

Kelima, dimensi diferensiasi agama. Menurut ketentuan yang berlaku di Indonesia, beberapa agama yang secara resmi diakui dan dijamin keberadaannya oleh pemerintah adalah agama Islam, Kristen protestan, Kristen katolik, Budha, Hindu, dan Konghucu. Perbedaan agama di satu sisi memang rawan karena bisa menjadi benih perpecahan. Tetapi, sepanjang masing-masing umat mau saling mengembangkan sikap toleransi dan saling menghormati hak masing-masing umat, niscaya kerukunan dan kestabilan akan tetap bisa terjaga dengan baik. Namun, banyak juga konflik yang terjadi di masyarakat karena dilatar belakangi oleh faktor diferensiasi agama. Sikap tidak adanya toleransi antar masing-masing pemeluk agama dan juga tidak adanya sikap saling menghormati hak masing-masing menjadi faktor utama pemicu konflik dan perpecahan dalam masyarakat.

Secara sosiologis, agama sangat penting bagi kehidupan manusia dimana pengetahuan dan keahlian tidak berhasil memberikan sarana adaptasi atau mekanisme penyesuaian yang dibutuhkan. Kedudukan agama menjadi sangat penting sehubungan dengan unsur-unsur pengalaman manusia yang diperoleh dari ketidakpastian, ketidakberdayaan dan kelangkaan yang memang merupakan karakteristik fundamental kondisi manusia. Peran agama memang sangat penting bagi kehidupan manusia, terutama dalam bermasyarakat. Agama mampu mengatur dan mengarahkan manusia menuju ke kehidupan yang lebih baik, melalui nilai, norma, dan ajaran-ajaran agama.

Konflik yang terjadi di daerah Ambon dikabarkan adalah konflik yang terjadi karena perbedaan agama dan keyakinan, yaitu antara masyarakat Muslim dengan Kristen. Dengan demikian bisa kita simpulkan bahwa agama yang dominan di Ambon adalah agama Islam dan Kristen.

Dalam sejarah, kedua agama ini memang selalu bertikai. Contohnya dalam perang salib dan isu terorisme yang dihembuskan oleh orang kristen barat terhadap masyarakat muslim. Dalam prakteknya pun masyarakat dari kedua agama ini sangat sulit untuk hidup berdampingan. Sehingga sering muncul konflik. Klaim kebenaran terhadap salah satu agama menjadi salah satu faktor pemicunya. Bahkan sebagian kecil masyarakat muslim menganggap bahwa orang kristen adalah orang kafir, dan wajib dibunuh, dan mungkin pula sebaliknya.

Berdasarkan analisis data Sensus 1971 dan Survei Penduduk Antar Sensus (Supas) 1985, tampak bahwa penduduk beragama Islam di kepulauan Maluku meningkat dari 49,9 % pada tahun 1971 menjadi

54,8 % pada tahun 1985. Sebaliknya, proporsi penduduk beragama Kristen menurun dari 46,8 % pada tahun 1971 menjadi 44,1 % pada tahun 1985. Sementara itu, khusus untuk kota Ambon, pada tahun 1995, komposisi pemeluk agama Kristen dan Islam kurang lebih seimbang, pemeluk agama Kristen sebesar 52,93 %, pemeluk agama Islam sebanyak 41,71 %. Sisanya, 5,23 % memeluk agama Katholik, 0,08 % agama Hindu, dan 0,005 % beragama Budha.¹⁵

Jadi, kesimpulannya adalah kita tidak bisa begitu saja menjustifikasi bahwa konflik yang terjadi di Ambon adalah murni karena faktor diferensiasi agama, karena masih ada faktor-faktor yang lain sebagai pemicu konflik.

Yang nampak secara luar memang agamalah sebagai pemicu konflik, tetapi apabila dikaji secara lebih mendalam, terdapat faktor-faktor lain sebagai pemicu konflik.

Dialog dan Kerukunan Umat Beragama:

Sarana Harmonisasi Sosial dan Pencegah Konflik

Kerukunan merupakan nilai yang universal, yang dapat ditemukan dalam setiap ajaran agama. Semua agama pada hakikatnya mengajarkan umatnya untuk mawas diri. Dengan senantiasa mawas diri, umat beragama akan tetap dapat menjaga saling pengertian dengan umat lain dan benar-benar dapat mengembangkan wawasan kebangsaan.

Disamping itu setiap agama mengajarkan pula kepada umatnya untuk mengasihi sesama makhluk hidup dan bersikap positif terhadap alam. Hanya saja agama sering sekali dipahami secara sempit dan eksklusif oleh penganutnya dan disertai perasaan curiga yang berlebihan terhadap penganut agama lain. Sehingga mengakibatkan terjadinya berbagai macam konflik di masyarakat. Sementara itu, sikap fanatisme yang berlebihan dikalangan penganut agama masih sangat dominan, sehingga dapat menimbulkan disharmoni yang merugikan semua pihak, termasuk kelompok penganut agama.¹⁶

Bentuk-bentuk integrasi sosial untuk menciptakan kerukunan antar umat beragama tersebut, diantaranya; 1). Kegiatan sosial kemasyarakatan, misalnya gotong royong, kerja bakti, musyawarah bersama dan lain-lain. 2). Kegiatan upacara lingkungan hidup, misalnya pertunangan, pernikahan, kelahiran, kematian dan lain-lain. 3). Hubungan - hubungan formal, misalnya struktur kepengurusan

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Yustiani, *Kerukunan Antar Umat Beragama Kristen dan Islam*, dalam Jurnal Pengkajian Masalah Sosial Keagamaan, Vol. XV, No.02 Mei-Agustus 2008.

organisasi dalam RT, RW, Desa, Kecamatan, atau bahkan Kabupaten dan Propinsi. Kemudian menurut Syamsudin, faktor-faktor pendukung untuk menciptakan integrasi diantaranya; 1). Faktor budaya (toleransi antar sesama umat manusia). 2). Faktor kekerabatan. 3). Faktor kepatuhan masyarakat kepada pemerintah.¹⁷

Beberapa pemikir menawarkan resolusi konflik, Jack Rothman mengatakan bahwa untuk mengatasi berbagai konflik yang ada di dalam masyarakat, perlu dilakukan berbagai tindakan yaitu: (1) Tindakan koersif (paksaan), perlu ada pengaturan administratif, penyelesaian hukum, tekanan politik dan ekonomi. (2) Memberikan insentif seperti memberikan penghargaan kepada suatu komunitas akan keberhasilannya menjaga ketertiban dan keharmonisan. (3) Tindakan persuasif, terutama terhadap ketidakpuasan yang dihadapi masyarakat dalam menghadapi realitas sosial, politik dan ekonomi. (4) Tindakan normatif, yakni melakukan proses membangun persepsi dan keyakinan masyarakat akan sistem sosial yang akan dicapai.

Penutup

Banyak orang menyebut, konflik Ambon merupakan konflik agama. Sementara, sebagian kalangan khususnya golongan menengah terdidik menilai bahwa konflik Ambon merupakan konflik politik, tepatnya konspirasi elite politik. Namun realitasnya, konflik dikonstruksi oleh masyarakat Ambon sebagai konflik yang melibatkan antara warga masyarakat Kristen dengan warga masyarakat Muslim di Maluku, sehingga pada dimensi ini orang mengatakan bahwa konflik tersebut merupakan konflik agama. Perbedaan pendapat terjadi pula di tingkat nasional. Kebanyakan elite politik di Jakarta berpendapat, konflik Maluku sebagai konflik politik, merupakan konspirasi elite tertentu yang menggunakan agama sebagai alat politik untuk menjatuhkan pemerintahan atau merusak proses demokratisasi yang tengah berlangsung. Beberapa tokoh politik di Jakarta berpendapat bahwa konflik Maluku adalah "perang agama", yang merupakan bagian dari strategi Kristen untuk memperluas pengaruh mereka dan pada akhirnya untuk mengkristenkan Indonesia. Dengan kata lain, konflik Maluku merupakan salah satu bentuk pemusnahan kelompok Muslim.

Paham pluralisme dalam masyarakat seringkali memunculkan berbagai konflik yang berujung pada tindakan kekerasan yang

17 Muh. Syamsudin, *Menciptakan Kerukunan Antar Umat Beragama Sebagai Pencegah Konflik*, dalam *Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama dan Perubahan sosial*, Vol. 2 No. 2, Juli-Desember 2008.

dilakukan oleh kelompok-kelompok etnik ataupun agama-agama tertentu, bahwa etnik dan agama hanyalah topeng dari konflik. Ada banyak dugaan, bahwa konflik lebih berorientasi pada perebutan sumber daya yang ada baik itu ekonomi, sosial, politik, ataupun yang lainnya, sementara etnik dan agama menjadi “kendaraan” bagi upaya perebutan sumber-sumber tersebut. Dan tanpa disadari oleh masyarakat, akhirnya masyarakat “terseret” dalam konflik tersebut.

Daftar Pustaka

- Narwoko, J. Dwi dan Bagong Suyanto (ed), 2007, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Trijono, Lambang, 2001. *Keluar dari Kemelut Maluku*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sinansari, Ecip, S., 1999. *Menyulut Ambon, Kronologi Merambatnya Berbagai Kerusakan Lintaswilayah di Indonesia*, Bandung: Mizan.
- Coser, Lewis, 1964. *The Functions of Social Conflicts*, New York: The Free Press.
- Syafei, Theo. “Islam Yang Galau”, dalam *Risalah Kongres Mujahidin I dan Penegakan Syari’ah Islam*, Yogyakarta: Wihdah Press, 2001.
- Soekanto, Soerjono, 2007, *Sosiologi, Suatu Pengantar*, Jakarta: Raja grafindo persada.
- Yustiani, *Kerukunan Antar Umat Beragama Kristen dan Islam*, dalam *Jurnal Pengkajian Masalah Sosial Keagamaan*, Vol. XV, No.02 Mei-Agustus 2008.
- Muh. Syamsudin, *Menciptakan Kerukunan Antar Umat Beragama Sebagai Pencegah Konflik*, dalam *Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama dan Perubahan sosial*, Vol. 2 No. 2, Juli-Desember 2008.
- Geertz, Clifford, *Konflik dan Integrasi Dalam Agama, Analisa dan Interpelasi Sosiologis*, Jakarta: AF. Saifuddin Press.
- Departemen Agama RI, *Pedoman dasar kerukunan umat beragama*, 1989, Sekjen Departemen Agama RI, Jakarta.
- Kimball Young, *Social Cultures Proseses*, dalam *Setangkai Bunga Sosiologi*, oleh Selo Soemardjan dan Soelaeman Soemardi, 1964, Penerbit Fakultas Ekonomi UI.
- Dandung Budi Yuwono, *Gerakan Multikultural di Tengah Konflik Ambon*, dalam *Harmoni, Jurnal Multikultural dan Multireligius*, Vol.VII, No.27, Juli-September 2008.
- SKH *Republika*, 17 Januari 2000.
- Miall, Hugh dkk. *Resolusi Damai, Konflik Kontemporer*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000.